



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 05 TAHUN 2017**

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai penghargaan atas prestasi kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja Daerah, selanjutnya disebut dengan TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kinerja yang dicapai.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalah CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. PNS Pusat adalah PNS Pusat yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

8. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
9. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pemerintah Provinsi Gorontalo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Sasaran Kerja Pegawai bulanan yang selanjutnya disingkat SKP-B adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam 1 (satu) masa kinerja.
12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dalam masa kinerja.
14. Penilaian Kinerja adalah proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja PNS.
15. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.
16. Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan/jabatan.

BAB II PENERIMA TKD

Pasal 2

- (1) Penerima TKD adalah PNS dan Calon PNS.
- (2) PNS penerima TKD adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (3) PNS Pusat dan PNS Daerah yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TKD setelah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (5) PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TKD setelah bertugas 1 (satu) tahun, kecuali menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (6) PNS Provinsi yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo serta Tenaga Medis yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberikan TKD selama pada instansi tersebut tidak memperoleh tunjangan sejenis.

- (7) Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan besaran 50% (lima puluh persen) dari tarif TKD.

BAB III

PENETAPAN TARGET DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Penetapan Target

Pasal 3

- (1) Kinerja dinilai berdasarkan capaian kinerja dalam satu masa penilaian yang meliputi aspek:
 - a. Integritas;
 - b. Etos Kerja; dan
 - c. Gotong royong.
- (2) Aspek integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari aspek disiplin, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, SPT Tahunan, Temuan Pemeriksaan Khusus dan Pakta Etika Perilaku PNS.
- (3) Aspek etos kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari aspek capaian SKP dan capaian berdasarkan aplikasi E-Monev.
- (4) Aspek gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari aspek kebersamaan dalam kegiatan keolahragaan dan apel kerja.

Pasal 4

- (1) Setiap PNS wajib menyusun SKP bulanan berdasarkan rencana kerja tahunan SKPD, standar teknis kegiatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan.
- (2) SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung/pejabat penilai.
- (4) Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh atasan langsung/pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
- (5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap awal bulan masa penilaian kinerja.
- (6) Jika terdapat alasan-alasan yang cukup, SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum penilaian kinerja dilakukan.
- (7) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib melampirkan bukti-bukti alasan serta SKP sebelumnya.

- (8) Tata cara penginputan dan penilaian SKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja ASN Berbasis Revolusi Mental Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.
- (2) Formulir Penetapan SKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penilaian TKD

Pasal 6

TKD dibayarkan berdasarkan hasil penilaian terhadap semua unsur kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja ASN Berbasis Revolusi Mental Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB IV

KATEGORI DAN TARIF DASAR TKD

Pasal 7

TKD digolongkan dalam kategori:

- a. TKD Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b. TKD Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. TKD Pejabat Administrator;
- d. TKD Pejabat Pengawas;
- e. TKD Pelaksana; dan
- f. TKD Fungsional.

Pasal 8

- (1) Tarif Dasar TKD pada setiap jenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Dasar TKD untuk Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f tercantum pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Terhadap PNS yang bekerja di Badan Penghubung Jakarta ditambahkan 30% (tiga puluh persen) dan Sub Bidang Penghubung Makassar ditambahkan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) TKD bagi PNS non struktural yang memiliki pangkat Pembina Tingkat I Golongan IVb ke atas dengan besaran Rp4.000.000,00.

- (5) Daftar nama-nama penerima TKD non struktural yang memiliki pangkat Pembina Tingkat I Golongan IVb ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB V

TKD BAGI PNS YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Bagi PNS atau CPNS yang mengikuti kursus LEMHANAS, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam Jabatan diberikan TKD.
- (2) Bagi PNS atau CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengikuti Diklat selama satu masa penilaian kinerja wajib menyusun SKP yang disetujui oleh atasan langsung/pejabat dengan melampirkan daftar hadir/perilaku selama mengikuti diklat serta persetujuan keterangan dari pelaksana diklat.
- (3) Persetujuan/Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan diklat.

BAB VI

PERHITUNGAN JUMLAH TKD

Pasal 10

- (1) Perhitungan pencapaian kinerja untuk masing-masing pejabat dan pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jumlah TKD yang dibayarkan setiap masa kinerja sebagaimana terdapat pada Lampiran V Peraturan Gubernur ini, adalah Tarif TKD dikali dengan total hasil penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja ASN Berbasis Revolusi Mental Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dikurangi dengan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- (3) Jumlah TKD yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan PPh Pasal 21 sebagaimana terdapat pada Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMBAYARAN TKD

Pasal 11

- (1) TKD dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (2) TKD dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (3) Pembayaran TKD untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VIII
TKD KE-TIGABELAS

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memberi penghargaan atas prestasi kinerja dapat diberikan TKD ke-tigabelas.
- (2) Sekretaris Daerah mengusulkan kepada Gubernur Gorontalo untuk memberikan TKD ke-tigabelas.

BAB IX
SANKSI

Pasal 13

- (1) PNS dan CPNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dikenakan pengurangan dan atau tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hukuman Disiplin Ringan:

1. Teguran lisan sebesar 20% dari TKD selama 2 (dua) masa kinerja penilaian;
2. Teguran tertulis sebesar 30% dari TKD selama 3 (tiga) masa kinerja penilaian; dan
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 40% dari TKD selama 4 (empat) masa kinerja penilaian.

b. Hukuman Disiplin Sedang:

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 75% dari TKD selama 3 (tiga) masa kinerja penilaian;
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 100% dari TKD selama 4 (empat) masa kinerja penilaian; dan
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 100% dari TKD selama 5 (lima) masa kinerja penilaian.

c. Hukuman Disiplin Berat:

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 100% dari TKD selama 6 (enam) masa kinerja penilaian;
2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 100% dari TKD selama 6 (enam) masa kinerja penilaian; dan
3. Pembebasan dalam jabatan sebesar 100% dari TKD selama 6 (enam) masa kinerja penilaian.

- (2) Setiap atasan langsung yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS dan CPNS yang menjadi bawahan wajib menyampaikan keputusan penjatuhan hukuman kepada yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. GUBERNUR GORONTALO,
ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI W/MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 05 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

1. LAMPIRAN I : FORMULIR PENETAPAN SASARAN KERJA PEGAWAI
2. LAMPIRAN II : TARIF DASAR TKD
3. LAMPIRAN III : TARIF DASAR TKD JABATAN FUNGSIONAL
4. LAMPIRAN IV : PERHITUNGAN JUMLAH TKD
5. LAMPIRAN V : PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(PPh 21)
6. LAMPIRAN VI : JUMLAH TKD YANG DIBAYARKAN

Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 05 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

FORMULIR PENETAPAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Nama Pegawai Yang Dinilai : Rian M. Laya
Jabatan : Kepala Sub Bidang Anggaran Area I Bidang Anggaran
Masa Penilaian (Bulan) : Januari 2017

No.	Kegiatan Tugas Jabatan	AK*)	Target Hasil	
			Vol.	Satuan
A	Pelaksanaan Tugas Manajerial			
1	Merencanakan kegiatan bulanan			
	Penetapan anggaran kas kegiatan pada seksi Anggaran Area I	0	2	Dokumen
2	Memeriksa dan mengoreksi tugas bawahan	0	15	Dokumen
3	Memberi disposisi terhadap naskah dinas	0	15	Dokumen
4	Memberi tanda tangan/paraf terhadap naskah dinas	0	35	Dokumen
5	Membuat konsep telaah sesuai disposisi pimpinan	0	15	Dokumen
B	Pelaksanaan Program/Kegiatan			
1	Surat Penyediaan Dana (SPD)			
a	Menerima surat permohonan SKPD	0	15	Dokumen
b	Memverifikasi surat permohonan SKPD	0	15	Dokumen
c	Koordinasi dengan BUD Kustodian	0	15	Dokumen
d	Mengkoordinir penginputan penyediaan dana dalam aplikasi SIMDA	0	15	Dokumen
e	Penyampaian ketersediaan dana dalam aplikasi SIMDA	0	15	Dokumen
f	Pelaporan dan evaluasi	0	15	Dokumen
2	SIMDA			
a	Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Pengembang Aplikasi SIMDA	0	1	Dokumen
b	Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Pengembang Aplikasi SIM-PD	0	15	Dokumen
c	Memberi disposisi penginputan persetujuan pergeseran anggaran dalam aplikasi SIMDA	0	15	Dokumen
d	Koordinasi Penginputan RKA-SKPD	0	15	Dokumen

Gorontalo, 2017

Pejabat Penilai,

Pegawai Yang Dinilai,

DANIAL IBRAHIM, SE., MM.
NIP. 19731102 200212 1 004

RIAN M. LAYA
NIP. 19760103 200212 1 006

Pt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 05 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

TARIF DASAR TKD

NO.	SKPD	TARIF TKD	Ess. III	Eselon IV	Staf	
					Teknis	Adm.
1	Sekretaris Daerah	25,000,000.00				
2	Asisten	14,500,000.00				
3	Dikbudpora	13,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
4	Bappeda	13,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
5	Badan Keuangan	13,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
6	Dinas Kesehatan	13,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
7	Inspektorat	13,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
8	Dinas Pertanian	13,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
9	Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi	13,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
10	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag	13,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	13,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
14	Dinas PU dan Penataan Ruang	13,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
15	Badan Kepegawaian Daerah	12,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
16	Badan Pendidikan dan Pelatihan	12,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	12,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
18	Dinas Perhubungan	12,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Biro Pemerintahan dan Otda	12,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
21	Biro Hukum dan Organisasi	12,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
22	Biro Umum	12,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
23	Biro Humas dan Protokol	12,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
24	Biro Pengendalian Pembangunan dan Biro Kesra dan Ekonomi	12,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
27	Staf Ahli	12,000,000.00				
29	Sekretariat DPRD	12,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
30	BPBD	12,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
31	Dinas Pangan	12,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
32	Dinas Pariwisata	12,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
33	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	10,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
34	Satpol PP Linmas dan Kebakaran	10,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
35	Badan Penghubung		5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00
36	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10,000,000.00	5,600,000.00	4,000,000.00	2,350,000.00	2,250,000.00

- CATATAN:
1. Staf Teknis, terdiri dari :
- a. POKJA ULP pada Biro P2LP
 - b. Pengawas Lapangan Pada Dinas PU
 - c. Penjaga Pintu Air pada Dinas PU
 - d. Sopir Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten/Kepala SKPD/Kepala Biro/Staf Ahli/Kepala Kantor
 - e. Petugas Humas dan Protokoler padaa Biro Humas yang ditetapkan dengan SK Gubernur
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja yang di tetapkan dengan SK Gubernur
 - g. Pengelola Program Aplikasi Sistem pada SKPD (Siransija, SIMDA, e-Monep, e-protrack,SIMPEG, e-Formasi,SIM-PD,SIPAM
 - h. Penganalisa Data (LPPD,LAKIP,LKPD,LKPJ,dll)
- 2 Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang ditetapkan dengan SK Gubernur

Plt. GUBERNUR GORONTALO,
ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 05 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

TARIF DASAR TKD JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan /Tingkat Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Tunjangan Kinerja Daerah 2017
Widyaiswara			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3.885.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4.882.500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6.624.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 10.000.000
Perencana			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3.885.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4.960.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7.008.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 10.000.000
Analisis Kepegawaian			
Terampil	Pelaksana	II/c – II/d	Rp 2.919.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3.157.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3.812.500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4.102.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5.099.500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6.777.600
Auditor Kepegawaian			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3.850.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4.727.500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6.432.000
Auditor			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2.825.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2.986.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3.593.750
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3.850.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4.727.500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6.432.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 9.500.000
Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah /Pengawas Pemerintahan (P2UPD)			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3.850.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4.727.500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6.432.000

Pengawas Sekolah			
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,549,250
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,779,200
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 6,170,500
Pamong Belajar			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,130,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,960,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,624,000
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,825,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,437,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,808,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,417,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,664,000
Penera			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,825,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,468,750
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,808,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,417,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,664,000
Penguji Mutu Barang			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,825,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,468,750
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,808,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,417,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,664,000
Instruktur			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,825,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,468,750
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,808,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,417,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,664,000
Mediator Hubungan Industrial			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,808,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,417,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,664,000

Penyuluh Pertanian			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,950,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,190,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 4,037,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,186,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,285,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,123,200
	Utama	V/d – IV/e	Rp 8,097,500
Pengawas Benih Tanaman			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,950,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,190,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,962,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,186,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,192,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,008,000
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,950,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,190,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,887,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,144,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,146,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,892,800
Penyuluh Perikanan			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,432,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 7,482,500
Pengawas Perikanan			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,437,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,808,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,417,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,971,200
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 6,908,500

Inspektur Tambang				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	3,885,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,960,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,720,000
Penyuluh Kehutanan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	2,950,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,190,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	4,037,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,186,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,285,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,123,200
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	8,097,500
Polisi Kehutanan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	2,950,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,256,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	4,112,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,186,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,564,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,353,600
Polisi Pamong Praja (Pol PP)				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,432,000
Medik Veteriner				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,186,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,471,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,296,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	8,220,500
Paramedik Veteriner				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	2,950,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,223,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	4,075,000
Pengawas Bibit Ternak				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,050,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,600,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	4,600,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,450,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,200,000

Pembimbing Kesehatan Kerja			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,815,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,378,750
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,664,000
Epidemiolog Kesehatan			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,336,000
Nutrisionis			
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,336,000
Pranata Laboratorium Kesehatan			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,336,000
Pranata Komputer			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,593,750
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,432,000
	Utama	V/d – IV/e	Rp 7,482,500
Pranata Hubungan Masyarakat			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,437,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,808,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,417,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,952,000

Pustakawan			
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp 2,940,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,157,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,937,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,158,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,037,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,892,800
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 7,687,500
Arsiparis			
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,500,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,815,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,378,750
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,664,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 6,457,500
Dokter			
Ahli	Pertama	III/b	Rp 3,885,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,960,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,008,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 7,892,500
Perawat			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,336,000
Bidan			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,336,000

Plt. GUBERNUR GORONTALO,
ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pustakawan			
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp 2,940,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,157,000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp 3,937,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,158,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,037,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,892,800
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 7,687,500
Arsiparis			
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c - III/d	Rp 3,500,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,815,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,378,750
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,664,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 6,457,500
Dokter			
Ahli	Pertama	III/b	Rp 3,885,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,960,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,008,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 7,892,500
Perawat			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,336,000
Bidan			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,336,000

Plt. GUBERNUR GORONTALO,
ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 05 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN KINERJA													
NO.	NAMA	INTEGRITAS (40%)					NILAI INTERGRITAS	ETOS KERJA (50%)	NILAI ETOS KERJA	GOTONG ROYONG (10%)		NILAI GOTONG ROYONG	TOTAL KINERJA
		DISIPLIN	LHKPN/ LHKSNI	SPT	TEMUAN	ETIKA		SKP/E-MONEV		KERJA SAMA	APEL KERJA		
1	HUZAIRIN	75	10	5	5	5	40	80	40	50	50	10	90
2	DANIAL	60	10	5	5	5	34	70	35	50	50	10	79
3	FERRY	75	0	5	5	5	36	70	35	50	50	10	81
4	EVI	75	0	5	5	5	36	70	35	50	50	10	81

Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 05 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

JUMLAH TKD YANG DIBAYARKAN

Nama SKPD :

Masa Penilaian :

No	Nama	Jabatan	Esebn	NPWP	Dasar TKD (Rp)	Nilai Kinerja (%)	Jumlah TKD (Rp)	Potongan Hukuman Disiplin	Jumlah TKD sebelum PPh (Rp)	Potongan PPh 21	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)/100	9 (% pot x 8)	10 (8 - 9)	11	12 (10 - 11)	13
1	Danial	Administrator	III	XX.XXX.XXX.X-822.000	5.600.000	95,12	5.326.720	-	5.326.720	799.008	4.527.712	

Menyetujui,

Kepala

Bendahara Pengeluaran

()

()

Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 05 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

**PERHITUNGAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21)**

NO	URAIAN PENGHASILAN	BESARAN PPh 21	URAIAN PERHITUNGAN
1.	Gol. I dan II	0 %	<u>Catatan:</u> 1. Dasar pengenaan PPh adalah jumlah TKD yang terdapat pada kolom 10 Lampiran VI 2. Contoh perhitungan a. Nona (Gol. II) menerima TKD = Rp2.450.000,- PPh 21 0 % x Rp. 2.450.000.- = Rp0,- b. Surianto, Ess. IV (Gol. III) menerima TKD = Rp4.000.000,- PPh 21 5 % x Rp. 4.000.000 = Rp200.000,- c. Danial, Ess. IIIA (Gol. IV) menerima TKD = Rp5.600.000,- PPh 21 15 % x Rp. 5.600.000 = Rp840.000,- d. Huzairin, Ess. IIA (Gol. IV) menerima TKD = Rp12.000.000,- PPh 21 15 % x Rp. 12.000.000 = Rp1.800.000,-
2.	Gol. III	5 %	
3.	Gol. IV	15 %	

Plt. GUBERNUR GORONTALO.

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH